

**Judul** : Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP Bakal Mulus  
**Tanggal** : Kamis, 15 Desember 2016  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 2

## Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP Bakal Mulus

Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU MD3 Masuk Prolegnas Prioritas

**JAKARTA** — Harapan Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) mendapatkan jatah kursi pimpinan DPR bakal segera terwujud. Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan revisi UU Nomor 42/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tambahan 2016.

"Raker Baleg bersama Kemenkumham dan DPD RI pada 14 Desember 2016 menyetujui untuk menyepakati RUU perubahan kedua atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masuk di dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016," kata Wakil Ketua Baleg DPR Dossy Iskandar membacakan simpulan raker di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dossy mengatakan semua fraksi di DPR bulat menyetujui masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas 2016. Meskipun dalam proses pembahasan ada beberapa perwakilan fraksi yang mempertanyakan urgensi masuknya RUU MD3 dalam prolegnas prioritas, setelah melakukan diskusi lebih dalam akhirnya semua fraksi menyetujui revisi UU MD3 segera dilakukan. "Beberapa fraksi mempertanyakan adanya keputusan Majelis Kehormatan DPR (MKD) yang mendorong revisi terbatas UU MD3 terkait penambahan 1 kursi pimpinan DPR dan 1 kursi pimpinan MPR karena hal itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada," katanya.

Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan dalam pembahasan memang ada pertanyaan dari berbagai fraksi mengenai putusan MKD yang mendorong revisi UU MD3. Namun hal itu sudah diklarifikasi di mana usulan revisi UU MD3 merupakan kewenangan Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, sedangkan putusan MKD hanya menjadi referensi. "Yang berwenang menentukan itu (revisi) adalah Baleg dan pemerintah karena direvisi secara terbatas yang terserah DPR untuk menindaklanjuti," ujarnya.

Menurut Yasonna, revisi UU MD3 ini dengan penambahan 1 pimpinan DPR akan membuat kinerja DPR jadi lebih baik. Terakomodasinya semua kekuatan besar di DPR di kursi pimpinan akan menciptakan keseimbangan politik. Dia mengingatkan bahwa perubahan UU MD3 pada akhir 2014 lahir dari suasana politik yang sangat keras. Tapi sekarang situasi politik semakin baik, beberapa penguatan kelembagaan dilakukan. "Ya kita serahkan ke DPR, pemerintah mendukung supaya apa? DPR ini bersama pemerintah berjalan beringan. Kalau sudah kehendak DPR ya pemerintah ikut oia, kita dukung, saya kira ini baik untuk mengakomodasi dinamika di DPR," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia Kerja (Panja) Prolegnas 2017 Firman Soebagyo mengatakan, dirinya telah menandatangani surat usulan revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas Tambahan 2016. Surat itu sudah dikirim ke pimpinan DPR guna ditindaklanjuti dalam rapat pimpinan (rapim), kemudian rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. "Ini kan urutannya begitu, diselesaikannya begini, tapi saya sudah tanda tangani surat untuk dibawa ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti," kata Firman sesuai raker.

Menurut Firman, sangat memungkinkan jika pembahasan revisi terbatas UU MD3 itu diselesaikan sebelum masa sidang kedua yang bakal selesai hari ini. Namun bisa juga dibahas pada masa reses atas izin pimpinan DPR dalam rapat Bamus. Tapi dirinya belum tahu siapa yang akan ditugaskan membahas revisi terbatas ini. Yang terpenting proses usulan telah sesuai dengan mekanisme. "Apakah dibentuk pansus, panja



Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) mengikuti rapat kerja dengan panitia khusus Revisi UU Antiterorisme di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin. Selain mengikuti raker tentang revisi UU Antiterorisme Yasonna juga mengikuti raker dengan Baleg DPR dan DPD RI membahas masuknya revisi UU MD3 dalam Prolegnas Prioritas 2016.

atau ditugaskan ke Baleg itu tergantung Bamus," ujarnya.

Yang jelas, Firman menambahkan, sesuai pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan revisi UU tentang Partai Politik (Partai) selesai, akan ada lagi pembahasan revisi UU MD3 secara menyeluruh. Karena ada ketentuan yang berubah akibat RUU Pemilu serentak. "Itu lebih bagus daripada buru-buru tapi hasil tidak maksimal," sebutnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pimpinan sudah melakukan rapim membahas surat dari Baleg mengenai revisi terbatas UU MD3 bersama dengan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR lainnya Taufik Kurniawan. Dan Kamis pagi akan diadakan

rapat Bamus sebelum rapat paripurna guna melihat apakah memungkinkan membahas revisi UU MD3 ini sebelum berakhirnya masa sidang kedua 2016-2017 pada tanggal 15 Desember 2016 ini. "Apakah ada kemungkinan memasukkan jadwal revisi sebelum prolegnas tahun ini ditutup. Itu yang akan kita lihat besok," kata Fahri kemarin malam.

Adapun kemungkinan pengesahan revisi UU MD3 pada hari Kamis, menurut Fahri, itu akan sangat bergantung pada hasil rapat Bamus. Dan ketika disepakati untuk dibahas tentunya Presiden harus mengirimkan

utusan pemerintah untuk membahas bersama, baru setelah itu dilakukan kembali rapim, rapat Bamus dan disahkan

di paripurna.

"Ya kita lihat oia, penjadwalan hak Bamus, kalau Bamus tak akan oke setuju. Urusannya di fraksi-fraksi. Tadinya kita mau bikin malam ini. Tapi banyak yang nonton bola," ujar Fahri.

Disisilain, Wakil Ketua Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, ini berangkat dari kesepakatan politik dan kalau komitmen semua fraksi kuat atas kesepakatan itu, tidak terlalu sulit untuk melaksanakan revisi terbatas dalam waktu yang tersisa. Apalagi soal substansinya sederhana, yakni perubahan Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 84 ayat 1.

"Kalau mau komitmen kuat dilaksanakan, dalam waktu satu hari bisa dilakukan. Dan semua fraksi berkomitmen agar bisa diselesaikan dalam masa

persidangan ini. Tinggal komitmen sejauh mana komitmen tersebut," kata Arif.

Arif juga mengungkapkan skenarionya adalah melakukan rapim dan rapat Bamus, kemudian usulan dibawa ke rapat paripurna untuk pengesahan UU MD3 masuk Prolegnas Prioritas 2016. Selanjutnya paripurna memutuskan siapa yang membahas revisi, misalnya Baleg yang membahas untuk kemudian sore hari ini (Kamis) dibawa lagi ke paripurna untuk disahkan.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mendukung penambahan 1 pimpinan DPR dan 1 pimpinan MPR. Dia mengatakan, meskipun seharusnya jumlah pimpinan ganjil bukan genap, Gerindra akan menaati apa yang sudah men-

jadi kesepakatan. Gerindra berharap agar perubahan komposisi pimpinan DPR akan membawa DPR menjadi lebih baik.

"Di sini kan kolektif kolegial, pimpinan cuma corong, tidak mengambil keputusan, ambil keputusan di Bamus dan rapat paripurna, kami tidak permasalahan. Keputusan pimpinan meneruskan atas apa yang diputuskan komisi atau paripurna," sebutnya.

Sementara itu dalam raker Baleg, sebanyak 50 RUU disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2017 di mana 40 RUU merupakan carry over dari Prolegnas Prioritas 2016 yang pembahasannya sudah berjalan di 2016. Dan 10 RUU merupakan usul dari DPR (6 RUU), pemerintah (3 RUU) dan DPD RI (1 RUU).

● kiswondari